

No	Indikator	Target 2015	Capaian 2015	Target 2016	Capaian 2016	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		"B"	"B"			
		Diklatpim IV "C"	Diklatpim IV "B"	Prajabatan "A"	Prajabatan "B"	<
		Diklatpim III "C"	Diklatpim III "B"	- Diklatpim IV "B"	- Diklatpim IV "B"	=
9.	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	- Diklatpim III "B"	- Diklatpim III "B"	=
10.	Rumah Layak huni yang dibangun	1.000 Unit	711 Unit	1000 Unit	861 unit	<
11.	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	3 desa dan 3 kelurahan	=			

2.3. Realisasi Anggaran tahun 2016

Salah satu bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan pelaksanaan evaluasi keuangan untuk masing-masing instansi. Hal ini perlu dilakukan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Secara umum hasil evaluasi realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing instansi telah menunjukkan kinerja yang baik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.27
Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2016

NO	SKPD	PAGU	REALISASI SIMDA 2016	
			JUMLAH REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	99.590.487.894,08	91.630.809.221,00	92,00
2	DINAS KESEHATAN	81.378.704.535,00	74.845.818.752,00	91,97
3	RSUD HASRI AINUN HABIBIE	76.285.751.356,00	69.141.196.507,00	90,63
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	173.480.694.315,79	163.280.684.016,00	94,12
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.850.000.000,00	10.649.730.686,00	89,87
6	DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMINFO	14.528.690.000,00	13.546.541.753,7	93,24
7	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RISET DAERAH	5.938.635.000,00	5.673.508.432,00	95,54
8	DINAS SOSIAL	10.290.000.000,00	9.743.220.341,00	94,69
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.426.803.310,00	6.247.571.251,00	97,21
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	9.031.982.000,00	8.660.041.777,00	96,07
11	DINAS KOPERASI UMKM PERINDAG	13.433.447.300,00	12.446.016.541,00	92,65
12	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP	5.575.000.000,00	5.416.639.429,00	97,16
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.750.000.000,00	6.260.203.736,00	92,74
14	PIMPINAN SETDA	32.403.150.000,00	28.189.296.554,00	87,00
15	BIRO PEMERINTAHAN	49.880.837.300,00	43.779.336.432,00	87,77
16	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	3.650.000.000,00	3.530.369.243,00	96,72
17	BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI	3.000.000.000,00	2.959.402.681,00	98,65
18	BIRO PP DAN KESRA	9.600.000.000,00	8.733.016.992,00	90,97



19	BIRO UMUM	15.050.000.000,00	14.016.691.626,00	93,13
20	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	11.151.616.800,00	10.080.336.289,00	90,39
21	SEKRETARIAT DPRD	52.000.000.000,00	49.550.292.319,00	89,12
22	DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14.375.000.000,00	13.525.106.464,00	94,09
23	INSPEKTORAT	6.412.500.000,00	6.024.353.163,00	93,95
24	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	11.241.850.000,00	10.678.067.690,00	94,98
25	KANTOR PERWAKILAN JAKARTA	4.230.000.000,00	3.997.767.590,00	94,51
26	KANTOR SATPOL PP DAN LINMAS	7.900.000.000,00	7.496.528.930,00	94,89
27	SEKRETARIAT DP KORPRI	2.750.000.000,00	2.504.463.096,00	91,07
28	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PIJ	3.801.000.000,00	3.551.139.424,00	93,43
29	BPM-PDT	31.430.500.000,00	31.111.581.295,00	98,99
30	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ASET DAERAH	2.600.000.000,00	2.558.105.179,00	98,39
31	DINAS PERTANIAN TPH	40.381.074.875,00	36.980.297.483,00	91,58
32	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	26.723.000.000,00	25.430.552.960,00	95,16
33	BADAN KOORDINASI PENYULUHAN	4.500.000.000,00	4.265.946.258,00	94,80
34	DINAS KEHUTANAN DAN ESDM	6.372.024.000,00	5.941.820.478,00	93,25
35	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	26.065.820.000,00	24.187.847.366,00	92,80

Masalah dan Tantangan Pokok 2018

RKPD 2018 merupakan tahun awal dari periodisasi RPJMD 2018-2022. Namun demikian dalam penyusunan RKPD 2018, masih mengacu pada arahan kebijakan pembangunan dalam dokumen jangka panjang RPJPD Provinsi Gorontalo. Sementara arahan kebijakan dan target pembangunan untuk periode 5 tahun belum ditetapkan. Untuk itu program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2018 perlu memperhatikan arah kebijakan, selain memperhatikan visi misi arah kebijakan jangka panjang daerah, juga perlu mengevaluasi pencapaian program kegiatan dan target pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya dan yang menjadi tantangan pembangunan pada periode selanjutnya. Beberapa target pembangunan yang belum tuntas, seperti penanggulangan kemiskinan, dan masalah pelayanan dasar perlu menjadi perhatian utama pembangunan tahun 2018.

Sementara untuk masalah dan tantangan pada tiap Misi yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut :

Permasalahan pada Misi Pertama adalah:

Perekonomian, Perekonomian Provinsi Gorontalo dinilai sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan Provinsi Gorontalo hingga tahun 2016 masih berada di angka 6,52 persen, masih diatas rata-rata nasional. Namun pencapaian pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan pemerataan pertumbuhan antar sektor. Sumber pertumbuhan sebagian besar masih berasal dari belanja pemerintah daerah, sedangkan sektor strategis seperti industri pengolahan, jasa perusahaan, pertambangan dan sector pariwisata masih perlu menjadi perhatian,

pembangunan sudah harus mendorong meningkatnya kinerja sektor-sektor sekunder, sebab sektor primer sangat terpengaruh pada kondisi cuaca dan alam. Untuk itu tantangan kedepan dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan pemerataan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Ekonomi Gorontalo yang masih bertumpu pada sektor primer pertanian, walaupun pertumbuhannya tinggi namun relative belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung dan berkeadilan, kondisi tersebut ditunjukkan melalui Indeks Gini Provinsi Gorontalo tahun 2016 yang berada di angka 0,30. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan relatif membaik, walaupun belum bisa tercapai sepenuhnya, kesenjangan masih cukup moderat dan tidak terlalu berubah dibandingkan tahun 2015 yang nilai koefisien Gini berada pada angka 0,32 sehingga pertumbuhan ekonomi belum bermanfaat positif buat sebagian besar masyarakat. Untuk itu kedepan diharapkan berangsur – angsur pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam mengembangkan perekonomian Gorontalo, adalah rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang dan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.

Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komoditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota belum dioptimalkan secara konkrit.

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena belum dimanfaatkan secara memadai untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah.

Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh.

Disamping itu sektor pariwisata Gorontalo memiliki potensi yang cukup besar, namun demikian belum dikelola dengan baik. Pengembangan sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dikelola secara terpadu dan kompherensif melibatkan beberapa sektor dan stakeholer pembangunan terkait. Pengembangan destinasi wisata yang ditunjang dengan penyediaan

fasilitas umum serta penguatan promosi wisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Provinsi Gorontalo, yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat.

Salah satu terobosan daerah dalam pengembangan perekonomian adalah mengembangkan Kawasan Industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (Gopandang). Pertimbangan dalam mengembangkan KEK adalah menyediakan suatu kawasan yang memiliki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi ekonomi tersebut adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas ekspor. Arah kebijakan ini diambil karena juga sesuai dengan arah kebijakan industri nasional yang mengarahkan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.

Disamping itu, untuk menggerakkan kembali sektor-sektor primer, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggariskan program pertanian terpadu untuk 5 (lima) lokasi, yaitu Kabupaten Boalemo yang berpusat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Pohuwato berlokasi di Kecamatan Randangan, Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Sumalata dan Kabupaten Bone Bolango yang dipusatkan di Kecamatan Suwawa. Dimana program dan kegiatan dilaksanakan secara integrative melibatkan beberapa sektor strategis dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain itu juga, dilakukan pengembangan beberapa sector pariwisata sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RiPPDA), dengan menetapkan 6 kawasan strategis pengembangan dan pembangunan pariwisata yaitu : (1) kawasan Strategis Olele – Botutonu'o, (2) kawasan strategis limboto – kota gorontalo dan sekitarnya, (3) kawasan strategis hutan nantu dan sekitarnya, (4) kawasan torosiaje dan sekitarnya, (5) kawasan pesisir selatan, dan (6) pulau saronde – desa mohano dan sekitarnya.

Infrastruktur, pengembangan infrastruktur dilakukan dengan terus meningkatkan penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan social dan ekonomi masyarakat, yaitu :

Transportasi. masalah dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara. Kondisi jalan provinsi hingga tahun 2016 sepanjang 432,51 dimana dari panjang jalan tersebut yang kondisinya baik sepanjang 209,00 Km, dalam kondisi sedang sepanjang 15,80 Km, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 24,43 Km dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 73,33 Km dan masih banyak akses jalan provinsi yang belum terbuka seperti ruas Tapa-atinggola 12 Km, Marisa-Tolinggula 59,75 Km, Aladi-Tulabolo 22 Km, Tangkobu-Pentadu 16,20 Km) pembukaan akses jalan baru tersebut untuk meningkatkan percepatan mobillitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar. Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut

mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pelabuhan - pelabuhan yang ada juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan rendahnya kontribusi sektor transportasi laut terhadap ekonomi daerah. Meningkatkan kapasitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo, keterbatasan sarana pelabuhan Anggrek, pelabuhan Marisa, serta pelabuhan Tilamuta, merupakan beberapa bagian yang menjadi tantangan untuk bisa diwujudkan. Pelabuhan Gorontalo merupakan pelabuhan pengumpul dan pendistribusi dikawasan teluk tomini, sedangkan Pelabuhan Tilamuta dan Bumbulan sebagai pengumpan ke pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek terletak di kawasan utara gorontalo yang saat ini melayani aktifitas bongkar/muat barang cargo dan peti kemas termasuk ekspor jagung. Keunggulan pelabuhan ini memiliki jarak yang **relatif dekat** dengan negara-negara tetangga dibandingkan dengan pelabuhan **Blitung** seperti Malaysia, Philipina, Korea dan Jepang. Sedangkan Pelabuhan **Kwandang** melayani antar pulau utamanya angkutan ternak sapi. Bandar udara Djalaluddin, juga menjadi prioritas daerah dalam meningkatkan sarana prasarana bandara dan fasilitas pendukung bandara menuju bandara International menjadi tantangan yang perlu direalisasikan kedepan.

Infrastruktur Pertanian. Rencana pembangunan waduk Bone Hulu dan Bendung Bolango Hulu menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja sektor pertanian, hal ini dikarenakan ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan serta lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan teknologi tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian yang sulit air.

Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan produksi perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah.

Energy Ketenagalistrikan. Sejak berdirinya Provinsi Gorontalo telah dihadapkan pada masalah keterbatasan kapasitas pembangkit listrik, namun setelah beroperasinya PLTU Molotabu, PLTG Paguat dan adanya pengoperasian kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) dengan kapastasi 120 MW untuk memenuhi kekurangan listrik di wilayah Gorontalo-Sulawesi Utara dan hasilnya saat ini Gorontalo surplus energi listrik 20 MW. Terpenuhinya kebutuhan listrik tersebut belum mengindikasikan kemandirian industry ketenagalistrikan di

Gorontalo, sebab tambahan energi tersebut masih berasal dari suplai energy listrik interkoneksi Suluttenggo dan pengoperasian kapal MVPP tidaklah permanen, untuk itu diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan sumber penggunaan listrik di perdesaan dan mempercepat pembangunan PLTU Anggrek agar dapat segera beroperasi, serta mendorong percepatan pembangunan PLTG Gorontalo 2 untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi listrik akibat meningkatnya investasi di daerah.

Perumahan dan Pemukiman. Belum adanya regulasi pengaturan penataan perumahan dan pemukiman, terbatasnya kemampuan dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar perumahan seperti lingkungan yang sehat, drainase dan persampahan, menurunnya kualitas pemukiman dan belum optimalnya kelembagaan yang bergerak dalam bidang pembangunan pemukiman dan perumahan adalah hal-hal yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Kedepan prioritas pembangunan perumahan diarahkan pada pembangunan perumahan swadaya baik melalui APBD maupun APBN dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan.

Akses Layanan Sanitasi dan Air Bersih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Hingga tahun 2016, persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak baru mencapai 56,27 persen dan persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat baru mencapai 69,5 persen. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya rumah tangga yang menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah tangganya sehari-hari di Gorontalo dan masih ada sekitar separuh rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang baik, hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan untuk terus ditingkatkan ditingkatkan.

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Data Badan Pusat Statistik Provinsi menunjukkan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2014 IPM Gorontalo mencapai 65,17 meningkat menjadi 65,86 tahun 2015. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indeks komposit mencerminkan kinerja pembangunan manusia yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan, Indeks ini menjadi indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Tantangan terbesar Gorontalo dalam meningkatkan IPM daerah antara lain bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kinerja sektor riil agar bisa memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat secara luas. Pendapatan masyarakat juga sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, ketersediaan pangan, kelancaran akses lalu lintas barang/jasa, sehingga beban ekonomi masyarakat menjadi lebih rendah. Hal

lain yang cukup penting adalah akses masyarakat terhadap permodalan. Masih terbatasnya kredit bagi usaha kecil menengah dan tingginya tingkat bunga bank masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius.

Pariwisata, Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata yang cukup memadai, namun pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa masalah antara lain adalah daya saing pariwisata yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif, dan terbatasnya sumber daya manusia bidang pariwisata. Dari permasalahan tersebut, maka tantangan bidang kepariwisataan adalah menciptakan iklim usaha di bidang pariwisata, meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis informasi dan teknologi. Disamping itu pengembangan kawasan pariwisata strategis difokuskan pada pengembangan objek wisata unggulan sebagai Prime Mover Pembangunan pariwisata, yang telah disusun dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Pengembangan UMKM dan Koperasi, Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri Kecil Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi struktural & kultural para pelaku pasar di daerah dari *pseudo-entrepreneur* menjadi *pure entrepreneur*; memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda tentang Kemudahan Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); peningkatan peran Perbankan selaku *Agent of Development* guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional.

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan koperasi hingga tahun 2016 masih bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM KUMKM. Disamping itu optimalisasi fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM masih berlaku. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat.

Investasi Daerah, Secara makro, perkembangan ekonomi Gorontalo telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Ekonomi Gorontalo masih cukup tinggi, tumbuh 6,52 persen pada tahun 2016. Namun, struktur perekonomian tersebut dibentuk oleh investasi Pemerintah melalui konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Kendala dalam meningkatkan iklim investasi adalah belum harmonisnya peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah serta masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha disamping itu juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan

infrastruktur termasuk energi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran pelaku usaha dalam penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi, meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan penyediaan energi dan infrastruktur adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan investasi di Gorontalo kedepan.

Permasalahan Pada Misi Kedua

Pendidikan, Prodira merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan sektor Pendidikan di Provinsi Gorontalo yaitu dengan pemberian subsidi pendidikan. Namun sektor pendidikan ini masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor pendidikan antara lain yaitu: Masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, meningkatkan pemerataan distribusi guru, meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara umum untuk meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga atas. Disamping itu perluasan akses pendidikan tidak hanya dari pendidikan formal, namun juga diupayakan melalui peningkatan akses pendidikan informal, pemberian soft skill untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan, permasalahan di sektor kesehatan adalah masih terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum

terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, angka kematian Ibu melahirkan angka kematian bayi, gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sektor kesehatan.

Permasalahan Pada Misi Ketiga

Pertanian secara luas, Sektor pertanian Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya produktivitas di sektor pertanian khusus untuk komoditi padi dan jagung, dimana produktivitas padi dan jagung tahun 2016 masing-masing sebesar 52,16 Ku/Ha dari target yang ditetapkan untuk padi sebesar 55,51 Ku/Ha dan 46,59 Ku/Ha dari target yang ditetapkan untuk jagung sebesar 49,83 Ku/Ha. Untuk itu tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian yang implikasinya pada peningkatan Kesejahteraan petani yang diukur berdasarkan Nilai Tukar Petani. Untuk tahun 2016 Nilai Tukar Petani sebesar 105,95. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang diterima petani lebih besar dibanding biaya yang dibayar petani.

Tantangan di sektor pertanian lainnya adalah tidak ada surplus usaha yang berarti bagi petani mengakibatkan sektor pertanian semakin terpinggirkan. Hasil dari sensus pertanian menyatakan bahwa selama 10 tahun terakhir terjadi pengurangan RTUP dari 133.083 RTUP tahun 2003 menjadi 122.515 ditahun 2013. Penurunan tersebut terjadi di hampir seluruh sub sektor pertanian. Potret ini mengisyaratkan bahwa sektor primer akan semakin terpuruk seiring berkembangnya sektor industri dan jasa. Permasalahan lainnya di sektor pertanian adalah alih fungsi lahan menjadi lahan industri dan perumahan. Hal ini menyebabkan produksi pangan berfluktuasi. Oleh karenanya, optimalisasi usaha pertanian wajib dilakukan. Namun pada kenyataannya, upaya optimalisasi usaha pertanian masih terkendala berbagai persoalan diantaranya adalah rendahnya kualitas keterampilan SDM, kecilnya skala usaha, serta lahan pertanian yang makin menyempit.

Dalam rangka pengembangan sektor pertanian secara luas seperti peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang

nantinya akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Kedepan masih terus dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana prasarana produksi; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani; meningkatkan pemanfaatan teknologi; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi; memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam, dampak perubahan iklim merupakan persoalan yang menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana alam di Gorontalo. Hingga saat ini Permasalahan mendasar yang ada ialah masih rendahnya usaha preventif didalam memperkecil kemungkinan timbulnya bencana, masih maraknya penebangan liar (illegal logging) untuk membuka lahan baru dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan serta pencemaran air, belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase perlu diperbaiki, sehingga potensi banjir bisa diperkecil. Demikian halnya dengan kapasitas kelembagaan bencana di daerah sampai dengan tingkat kabupaten/kota, yang harus terus ditingkatkan, peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (1) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan;

(ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (iv) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (v) pengawasan pemanfaatan ruang.

Permasalahan Pada Misi Keempat

Sosial, Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, dll), Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) dan Kurangnya lembaga masyarakat yang peduli pada masalah kerawanan sosial merupakan persoalan - persoalan yang menjadi perhatian dalam urusan sosial.

Kebudayaan, Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi, Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah, Masih kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kebudayaan daerah.

Pemuda dan olahraga, pembangunan pemuda dan olahraga masih akan dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda serta budaya dan prestasi olahraga. Berdasarkan itu, maka tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun mendatang adalah meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan, menanggulangi masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS, meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia 15 tahun ke atas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka olahraga, meningkatkan jumlah dan kualitas SDM keolahragaan, meningkatkan upaya pembibitan atlet unggulan dan meningkatkan apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Permasalahan Pada Misi Kelima

Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan adalah program prioritas lintas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah yang didukung oleh para pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, tingkat

kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensi non pendapatan dari kemiskinan, merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten dan kontinyu. Secara garis besar, jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 203.690 jiwa atau 17,63 persen penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam, disamping itu program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin.

Disamping itu sesuai data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 24,30 persen sedangkan perkotaan sebesar 5,84 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada dipedesaan. Oleh karenanya tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pemerataan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya dipedesaan. Untuk mempercepat tingkat penurunan kemiskinan, maka perlu diintensifkan upaya-upaya prefentif dan kuratif yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Umum, upaya meningkatkan capaian dalam hal otonomi daerah, dan peningkatan pelayanan pada masyarakat persoalan yang masih mengemuka adalah:

1. Efisiensi kelembagaan perangkat pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan;
2. Perbaiki Pelayanan Publik melalui prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas dengan Revolusi Mental;
3. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal;
4. Masih rendahnya kualitas penyusunan Peraturan Daerah;
5. Pengelolaan aset daerah belum tertata dengan baik;
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
7. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi pada pembangunan daerah;
8. Kualitas aparatur daerah belum memadai;
9. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah;
10. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal;
11. Jumlah peneliti belum memadai;
12. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai;



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, maka kebijakan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi dan mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran serta pemerataan distribusi pendapatan.

Untuk melaksanakan strategi pembangunan melalui langkah-langkah strategis di atas tentunya perlu didasari oleh pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan kondisi ekonomi makro daerah dan trend perkembangannya yang tentunya menjadi dasar untuk dilakukan perkiraan/proyeksi perkembangan ekonomi di tahun 2018.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Perekonomian Gorontalo tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 31.823,65 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp.27,65 juta atau US\$2.078,33.

Ekonomi Gorontalo tahun 2016 tumbuh 6,52 persen lebih cepat dibanding tahun 2015 yang sebesar 6,22 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 18,45 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,35 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 bila dibandingkan triwulan IV-2015 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 7,02 persen, lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,65 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2016 mengalami kontraksi 3,36 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 12,26 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh Komponen Ekspor.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pertanian, kehutanan dan Perikanan (37,44 persen); Konstruksi (12,00 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,95 persen) masih mendominasi PDRB Gorontalo.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2016, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,34 persen, diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 persen; dan kategori Jasa Keuangan sebesar 0,68 persen.



Tabel 3.1
Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 & 2016 (Tahun Dasar 2010)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		Triw IV-2015	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw IV-2015	Triw III-2016	Triw IV-2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.516,05	3.307,87	2.910,05	1.848,49	2.362,01	2.072,43
B	Pertambangan dan Penggalian	98,17	95,52	102,13	77,08	73,41	78,37
C	Industri Pengolahan	313,21	340,45	337,40	225,17	238,42	236,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,85	3,66	3,84	3,93	4,82	5,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,82	4,48	4,56	2,77	3,17	3,21
F	Konstruksi	990,10	963,59	1.009,38	745,59	716,96	746,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	801,04	903,63	895,93	584,37	642,39	641,07
H	Transportasi dan Pergudangan	472,50	510,09	503,67	340,62	362,61	359,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	170,71	184,34	189,10	125,74	133,91	136,98
J	Informasi dan Komunikasi	191,43	211,47	215,18	166,56	180,38	184,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	282,88	330,40	356,53	212,09	242,24	258,57
L	Real Estate	144,75	155,58	159,35	112,09	116,26	119,12
M,N	Jasa Perusahaan	7,38	7,95	8,02	5,44	5,72	5,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	640,05	596,71	615,09	526,77	483,48	501,86
P	Jasa Pendidikan	322,46	318,99	339,23	253,53	246,76	255,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271,79	289,46	290,99	209,42	219,38	220,21
R,S, T,U	Jasa lainnya	126,82	131,50	132,98	101,09	103,57	104,64
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		7.356,01	8.355,70	8.073,42	5.540,71	6.135,51	5.929,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2016 (persen)

Lapangan Usaha		Triw III- 2016 Terhadap Triw II-2016	Triw IV-2016 Terhadap Triw III-2016	Triw IV-2016 Terhadap Triw IV-2015
(1)		(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-12,26	12,12	6,43
B	Pertambangan dan Penggalian	6,76	1,67	0,08
C	Industri Pengolahan	-0,63	5,22	6,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,28	27,82	12,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,20	16,12	14,92
F	Konstruksi	4,16	0,16	5,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,21	9,70	9,91
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,97	5,43	6,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	8,94	8,71
J	Informasi dan Komunikasi	2,33	10,82	10,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,74	21,91	18,45
L	Real Estate	2,46	6,29	8,31
M,N	Jasa Perusahaan	0,74	5,96	5,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,80	-4,73	-0,09
P	Jasa Pendidikan	3,34	0,58	3,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	5,15	8,48
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,03	3,51	3,54
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		-3,36	7,02	6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau *percapita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.3 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Gorontalo Tahun Dasar 2010
Tahun 2015 - 2016

PDRB Perkapita	2015	2016
Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)	25.181.098,75	27.654.340,21

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo

Inflasi, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2016 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Gorontalo, perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2016 secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga terutama pada kelompok bahan makanan. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 121,21 pada bulan November 2016 menjadi 121,78 pada bulan Desember 2016 menyebabkan inflasi sebesar 0,47 persen. Laju inflasi tahun kalender 2016 sebesar 1,30 persen dan inflasi "year on year" (Desember 2016 terhadap Desember 2015) sebesar 1,30 persen.

Inflasi Kota Gorontalo menjadi barometer inflasi yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks/inflasi pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,17 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,11 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,31 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,17 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,06 persen dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,45 persen. Kelompok yang mengalami penurunan indeks/deflasi yaitu kelompok sandang sebesar -0,11 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami **kenaikan harga** selama bulan Desember 2016 antara lain: mie kering instant, daging ayam kampung, daging ayam ras, daging sapi, bandeng/bolu, baronang, bubara, cakalang/sisik, cumi-cumi, deho,



kakap merah, kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso, udang basah, galafea, ikan asin belah, terl, susu bubuk, susu untuk balita, susu untuk bayi, telur ayam kampung, telur ayam ras, kangkung, kentang, ketimun, tomat sayur, wortel, kacang tanah, jeruk, pisang, bawang merah, bawang putih, kecap (isi), kemiri, cabai rawit, jahe, kunyit, kembang gula, teh, rokok kretek, rokok kretek filter, rokok putih, cat tembok, seng, tariff listrik, sabun cair/cuci piring, sabun detergen bubuk, baju kaos berkerah laki-laki, celana dalam pria, kemeja panjang katun laki-laki, celana panjang jeans wanita, baju anak stelan, obat dengan resep, obat flu, shampoo, bimbingan belajar, kertas HVS, sepatu olahraga pria, angkutan udara, bensin dan tariff telepon seluler.

Tabel 3.4
Laju Inflasi Kota Gorontalo Desember 2016, Tahun Kalender 2016 dan Desember 2016 Terhadap Desember 2015 menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

No	Kelompok / Sub kelompok	IHK	IHK	IHK	Inflasi	Laju	Y o Y
		Desember	November	Desember	Desember '16 (P to P)	Inflasi Thn kalender	
		2015	2016	2016	1)	2)	3)
1	2	3	4	5	6	7	8
UMUM		120,22	121,21	121,78	0,47	1,30	1,30
1	Bahan Makanan	125,01	126,50	127,78	1,17	2,38	2,38
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	124,44	128,72	128,86	0,11	3,55	3,55
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	114,86	115,76	116,12	0,31	1,10	1,10
4	Sandang	110,85	113,66	113,53	-0,11	2,42	2,42
5	Kesehatan	115,30	120,49	120,69	0,17	4,67	4,67
6	Pendidikan Rekreasi dan Olahraga	108,10	108,94	109,01	0,06	0,84	0,84
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	126,32	122,62	123,17	0,45	-2,49	-2,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

1) Inflasi Point to Point (P to P) - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks November 2016

2) Laju Inflasi / Inflasi Tahun kalender - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks Desember 2015

3) Inflasi Year on Year (Y on Y) - Perubahan Indeks Desember 2016 terhadap Indeks Desember 2015

Beberapa komoditas yang mengalami **penurunan harga** selama bulan Desember 2016 antara lain: tepung terigu, ekor kuning, laying/benggol, malalugis/sohiri, selar/tude, susu kental manis, bayam, daun bawang, kacang panjang, kol putih/kubis, sawi hijau, terong panjang, kacang hijau, alpukat, gula merah, jeruk nipis/limu, lada/merica, cabai merah, minyak goreng, gula pasir, kayu lapis, kompor, mukena, celana pendek, emas perhiasan, obat batuk, vitamin, buku tulis bergaris dan sepatu olah raga anak-anak. Pada bulan Desember 2016 masing-masing kelompok komoditas yang memberikan andil/ sumbangan inflasi adalah sebagai berikut : kelompok bahan makanan sebesar 0,2821 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,0175 persen, kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,0848 persen, kelompok sandang sebesar -0,0056 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,0069 persen, kelompok pendidikan,



rekreasi dan olahraga sebesar 0,0029 persen, dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,0835 persen.

Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau **Gini Ratio** telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah Indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Provinsi Gorontalo yang ditahun tahun 2013 berdasarkan perhitungan BPS berada di angka 0,43 bisa ditekan hingga turun pada angka 0,40 di tahun 2014 dan membaik di tahun 2015 di angka 0,32. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara lapisan penduduk di Gorontalo sudah mulai dapat diminimalisir.

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2016 mencapai 2,76 persen (dari angkatan kerja), mengalami penurunan dibandingkan Februari 2016 sebesar 3,88 persen atau TPT Agustus 2015 sebesar 4,65 persen. Sementara jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mencapai 562.196 orang, berkurang 1.206 orang dari keadaan Februari 2016 sebesar 563.402 orang, atau bertambah 44.408 orang dari keadaan Agustus 2015 sebesar 517.788 orang. Uraian jelas mengenai pengangguran di Provinsi Gorontalo digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.5
Penduduk Provinsi Gorontalo Berumur 15 tahun keatas
menurut Jenis kegiatan

Kegiatan Utama	2015		2016	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Angkatan Kerja	534.012	517.788	563.402	562.196
Bekerja	517.687	493.687	541.549	546.668
Pengangguran	16.325	24.101	21.853	15.528
Bukan Angkatan Kerja	270.619	295.718	257.849	265.935
Sekolah	70.311	78.825	79.484	75.928
Mengurus Rumah Tangga	166.751	185.526	152.535	168.119
Lainnya	33.557	31.367	25.830	21.888
Total Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas	804.613	813.506	821.251	828.131
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,06	4,65	3,88	2,76
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,37	63,65	68,60	67,89
Pekerja Tidak Penuh	147.329	140.344	139.239	140.242

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September tahun 2016 sebesar 17,63 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2016 sebesar 17,72 persen, berarti terjadi penurunan sebesar 0,09 persen. Jumlah penduduk miskin September 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak **203,69** ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2016 sebanyak **203,19** ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2016-September 2016 bertambah sebanyak 500 jiwa. Pada periode ini, jumlah penduduk



miskin di perkotaan mencapai 60 jiwa, sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 560 jiwa. Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2016 sebagian besar masih tinggal di perdesaan yaitu sebesar 88,21 persen dan sisanya 11,79 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa pada periode Maret 2016-September 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,72 persen menjadi 17,63 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,787 pada September 2016, yang sebelumnya pada Maret 2016 sebesar 4,116. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2016 sebesar Rp284.232 per kapita per bulan dan pada September 2016 menjadi Rp286.968 per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp2.736 per kapita per bulan atau naik sebesar 0,96 persen.

Pada September 2016, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp211.756 dan perdesaan sebesar Rp226.546. Disini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp75.400 dan perdesaan sebesar Rp59.453 maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan non makanan di perkotaan seperti perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan serta jasa lebih banyak dan harganya lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2016 sebesar Rp287.156 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp285.999 per kapita per bulan.

Tabel 3.6
Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo menurut Daerah
Tahun 2016

Rincian	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2016	209.232	75.076	284.308
September 2016	211.756	75.400	287.156
Perubahan (%)	1,21	0,43	1,00
Perdesaan			
Maret 2016	224.958	59.232	284.190
September 2016	226.546	59.453	285.999
Perubahan (%)	0,71	0,37	0,64
Kota+Desa			
Maret 2016	219.469	64.764	284.232
September 2016	221.772	65.196	286.968
	1,05	0,67	0,96

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Selain indikator kemiskinan dalam bentuk persentase dan jumlah penduduk miskin yang dijadikan sebagai dasar pengukuran kemiskinan, sebenarnya terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks.

Periode Maret 2016- September 2016 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,72 persen menjadi 17,63 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dapat dilihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,787 pada September 2016, yang sebelumnya pada Maret 2016 sebesar 4,116. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan.

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo terjadi penurunan dari 1,466 pada Maret 2016 menjadi 0,649 pada September 2016. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

Tabel 3.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Gorontalo Tahun 2016

Indikator	Maret 2016	September 2016	Perubahan (Mar'16-Sept'16)
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4,116	2,787	-1,329
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,466	0,649	-0,816

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2016 masih menunjukkan peningkatan yang baik, tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2015 dan masih berada

diatas capalan pertumbuhan ekonomi secara nasional, maka perkiraan kondisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2017 diuraikan dalam tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2017

No	Indikator	Perkiraan capaian tahun 2017
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6.81 - 7.10 %
2.	Inflasi	4 - 7 %
3.	Penduduk miskin	17,1 %
4.	Tingkat pengangguran terbuka	2.7 %
5.	PDRB per kapita ADHB (Rp)	30.128.680

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo, (dolah)

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2017 DAN TAHUN 2018

Global, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 2,4 persen dari prakiraan pada bulan Januari, yakni 2,9 persen. Langkah ini diambil akibat melambatnya pertumbuhan di Negara-negara maju , harga komoditas yang tetap rendah, lemahnya perdagangan global dan arus modal yang berkurang.

Menurut laporan terbaru *Global Economic Prospects*, Negara berkembang dan Negara berkembang pengeksport komoditas berupaya keras beradaptasi terhadap jatuhnya harga minyak dan komoditas utama lain, dan ini menjadi penyebab separuh dari revisi pemangkasan. Pertumbuhan di Negara-negara tersebut tahun ini diproyeksikan 0,4 persen, jauh lebih rendah dari proyeksi pada bulan Januari sebesar 1,2 persen.

Pertumbuhan yang lambat ini kembali menegaskan betapa pentingnya bagi Negara untuk menerapkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Pertumbuhan ekonomi adalah motor utama pengurangan kemiskinan. Karena itu kami prihatin ketika pertumbuhan di Negara-negara pengeksport komoditas berkurang akibat tekanan terhadap harga komoditas.

Negara berkembang yang mengimpor komoditas lebih tahan daripada Negara pengeksport, meski keuntungan dari turunnya harga energy dan komoditas lain belum terlalu terasa. Pertumbuhan mereka diproyeksikan sebesar 5,8 persen pada 2016, berkurang sedikit dari angka 5,9 persen pada 2015, seiring dengan rendahnya harga energy dan mulai pulihnya ekonomi Negara-negara maju yang telah mendukung kegiatan ekonomi.

Diantara Negara-negara berkembang yang besar, pertumbuhan Tiongkok diperkirakan berkisar antara 6,7 persen pada 2016 setelah tahun lalu berada di angka 6,9 persen. Ekspansi ekonomi India yang besar diperkirakan akan stabil di angka 7,6 persen. Brazil dan Rusia diproyeksikan berada pada resesi yang lebih

dalam dibanding prakiraan bulan Januari. Afrika Selatan diperkirakan tumbuh sekitar 0,6 persen pada 2016, 0,8 persen lebih lambat dibanding proyeksi pada bulan Januari.

Menurut laporan *Global Economic Prospects*, peningkatan signifikan dalam sector kredit swasta – didorong oleh suku bunga rendah dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan, yang belakangan ini semakin tinggi – ikut mempertajam potensi risiko bagi beberapa Negara berkembang.

Seiring dengan upaya Negara-negara untuk mengatasi tantangan, Negara-negara di Asia Timur dan Tenggara tumbuh solid, seperti halnya Negara-negara berkembang pengimpor komoditas di seluruh dunia. Namun, satu perkembangan yang perlu diantisipasi adalah pesatnya tingkat hutang swasta di beberapa Negara berkembang. Saat tren pinjaman melonjak, tidak mengherankan jika tingkat pinjaman macet, sebagai bagian nalknya pinjaman sebanyak empat kali lipat.

Dalam situasi pertumbuhan yang melamban ini, ekonomi global menghadapi risiko-risiko lebih besar, diantaranya pelambatan lebih lanjut pada negara-negara berkembang, perubahan besar pada sentimen pasar finansial, stagnasi pada negara-negara maju, periode rendahnya harga komoditas yang lebih lama dari perkiraan, risiko geopolitis berbagai negara, dan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan. Laporan ini memperkenalkan cara untuk mengkaji risiko-risiko terhadap proyeksi global dan menemukan bahwa situasinya lebih condong ke penurunan dibanding proyeksi bulan Januari lalu.

Prospek pertumbuhan yang lambat di negara-negara berkembang akan memperlambat, atau bahkan memutar balik kemajuan yang telah dicapai dalam mengejar tingkat pendapatan agar setara dengan negara-negara maju. Namun selama tiga tahun terakhir, beberapa negara berkembang pengimpor komoditas mampu mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan.

Ekonomi Nasional, Perekonomian Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,90 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,87 persen dan Jasa Lainnya sebesar 7,80 persen.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (20,51 persen), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,45 persen), dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil Sepeda Motor (13,19 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,92 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil Sepeda Motor sebesar 0,53 persen dan Konstruksi sebesar 0,51 persen.



Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2016 masih didominasi kelompok Provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,49 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,03 persen, Pulau Kalimantan 7,85 persen dan Pulau Sulawesi 6,01 persen, dan sisanya 5,59 persen di pulau-pulau lainnya.

Ekonomi Gorontalo, Perekonomian Gorontalo pada triwulan II 2016 tumbuh sebesar 5,40% (yoy) tercatat mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar 6,61% (yoy). Dari sisi penggunaan, perlambatan pertumbuhan disebabkan oleh perlambatan kinerja ekspor yang disebabkan penurunan hasil produksi di sektor pertanian terutama komoditas jagung yang merupakan komoditas utama Gorontalo yang di ekspor ke luar negeri. Selain itu perlambatan pertumbuhan juga disebabkan oleh perlambatan kinerja investasi pada triwulan II 2016 seiring belum optimalnya realisasi belanja modal pemerintah. Disisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan di seluruh komponen konsumsi disebabkan oleh terjaganya daya beli masyarakat akibat peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi swasta nir laba tercatat tumbuh seiring dengan adanya bulan puasa Ramadhan di bulan Juni 2016. Sedangkan dari sisi penawaran, perlambatan terjadi di sebagian lapangan usaha utama perekonomian Provinsi Gorontalo yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi, lapangan usaha konstruksi juga tumbuh melambat akibat adanya pemotongan anggaran pada dana belanja modal konstruksi pemerintah dan minimnya realisasi belanja investasi pemerintah terhadap proyek-proyek strategis. Disisi lain, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan laporan seiring meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mendorong peningkatan permintaan masyarakat pada triwulan laporan.

Memasuki triwulan III 2016, perkembangan berbagai indikator terkini mengindikasikan arah pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mengalami perbaikan. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian seiring dimulainya musim panen di akhir triwulan III 2016 dan realisasi gaji keempatbelas di awal triwulan III 2016 diperkirakan menjadi faktor pendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatnya kinerja sektor konsumsi rumah tangga dan kinerja lapangan usaha perdagangan seiring adanya perayaan hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Idul Adha) dan dimulainya tahun ajaran baru anak sekolah tahun ajaran 2016, Selanjutnya, percepatan realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal dan belanja barang dan jasa di triwulan III diperkirakan akan meningkatkan kinerja sektor konstruksi seiring dengan telah selesainya proses pengadaan barang dan jasa serta dimulainya pelaksanaan pekerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Gorontalo.

Disamping itu, dengan kondisi dan dinamika nasional yang diyakini makin kuat serta mulai membaiknya perekonomian global beberapa tahun terakhir ini, secara makro pada tahun 2017 - 2018 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di prediksi masih dalam kondisi baik, berdasarkan hal tersebut, maka indikator makro ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel. 3.9
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2017 - 2018

Indikator	Proyeksi	
	2017	2018
Pertumbuhan Ekonomi	6.81 - 7.10 %	7.39 - 7.68
Kemiskinan	17,1 %	16,57%
Tingkat Pengangguran Terbuka	2.7 %	2.64
PDRB Perkapita	30.128.680	32.603.020
Inflasi	4 - 7 %	4 - 7 %

Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo (dikolah)

Kedepan Provinsi Gorontalo akan fokus pada kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk membuat **struktur** ekonomi yang kuat agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengupayakan pembangunan yang inklusif agar kesejahteraan lebih merata dan lebih berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta terjadi secara berkelanjutan. Penguatan ekonomi tersebut akan diupayakan melalui **penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah** sesuai keunggulan wilayah juga **modernisasi sektor jasa** yang didukung oleh ketersediaan layanan **infrastruktur yang memadai**. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan **penguatan peranan UKM** yang lebih besar, peningkatan jumlah **kesempatan kerja**, khususnya **tenaga kerja produktif (decent jobs)**, dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (*financial inclusion*). Selanjutnya ketahanan ekonomi juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus membangun **ketahanan pangan dan ketahanan air** serta meningkatkan sector pariwisata dan mendorong masuknya investasi.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Oleh karenanya penyusunan APBD harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBD sebagai instrument otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial



dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Terkait dengan hal tersebut maka anggaran pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.

Sementara kebijakan keuangan daerah dalam sisi belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 – 2025 yang telah prioritas prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2018 sebagaimana arahan yang terkandung didalam RPJPD 2007 – 2025. Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2018 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018 akan mengakomodir prioritas sector berdasarkan permasalahan dan potensi utama daerah dalam rangka menyiapkan pijakan awal bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2018 – 2022. Prioritas pembangunan daerah tersebut sebagai berikut:



1. Pendidikan, yang difokuskan pada :

- a. Meningkatkan layanan pendidikan dasar berkualitas.
- b. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, dengan pembangunan USB dan penambahan RKB; Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa.
- c. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi daerah dan memperluas akses masyarakat miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
- d. Peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.
- e. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru.

2. Kesehatan, diarahkan pada aspek:

- a. Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Keluarga, terutama Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas serta Pelayanan Gizi Masyarakat;
- b. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, melalui Peningkatan pelaksanaan STBM di kabupaten/Kota; Peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku *hygiene*; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja;
- d. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta);
- f. Meningkatkan Akses dan mutu fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan yang Berkualitas;
- g. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- h. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan;
- j. Meningkatkan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan.

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, akan diupayakan melalui:

- a. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);
- b. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;



- c. Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;
 - d. Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasional (jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api ekonomi);
 - e. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta Desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian dan perikanan;
 - f. Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan energy ketenagalistrikan;
 - g. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.
- 4. Peningkatan Ekonomi, akan didorong melalui :**
- a. Penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan komoditi pertanian dan perikanan;
 - b. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - c. Pembangunan pariwisata, melalui peningkatan promosi pariwisata, pembangunan destinasi pariwisata serta memperkuat kelembagaan pariwisata;
 - d. Meningkatkan ketahanan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan dan perikanan serta ketahanan air;
 - e. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
 - f. Peningkatan Pertumbuhan Investasi di daerah dan membaiknya proses perizinan investasi;
 - g. Penanggulangan Kemiskinan melalui Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar, dan Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.
- 5. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah, akan didorong melalui:**
- a. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi strategi yang akan ditempuh antara lain: pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan (*Grand Design* dan *Road Map*) yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh Instansi.
 - b. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif. melalui pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain: penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

6. Pengembangan Budaya dan Keagamaan, dilakukan melalui:

- a. Peningkatan potensi nilai Informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya.
- b. Pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Peningkatan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan langsung (hibah).

7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan;

Menjaga kualitas lingkungan hidup (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (viii) pemantauan kualitas udara ambien Peningkatan tutupan lahan/hutan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

- a. Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2015- 2018.
Pada tahun 2015 realisasi pendapatan daerah sebesar **Rp1,389,324,212,789.95**, tahun 2016 (sebelum audit BPK RI) sebesar **Rp1,595,099,203,009.91** dan tahun 2017 ditargetkan sebesar **Rp1,696,470,164,000.00** Perkembangan realisasi pendapatan daerah serta realisasi sementara tahun 2016 (sebelum di audit BPK RI) dapat dilihat pada Tabel 3.10 dan Tabel 3.11 berikut.



Tabel 3.10
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2015 S/D 2018

No	Uraian	2015	2016 (Data 17 Jan 17)	%	2017	%	Rata2 Konalkan
				±		±	
1	PENDAPATAN	1,389,324,212,789.98	1,896,099,203,009.91	14.81	1,696,470,164,000.00	6.38	10.68
1.1	PAD	289,667,161,141.96	324,240,721,492.91	11.98	356,398,685,000.00	9.92	10.96
1.1.1	Pajak Daerah	260,996,261,680.00	280,547,015,501.23	7.49	326,098,685,000.00	16.24	11.86
1.1.2	Retribusi Daerah	4,072,217,710.00	6,022,350,233.00	47.89	6,000,000,000.00	(0.37)	23.78
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg dipisahkan	3,81,275,405.00	2,101,314,049.00	100.00	4,000,000,000.00	90.36	95.9
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	21,307,398,366.95	35,570,041,709.68	66.94	20,300,000,000.00	(42.93)	12.00
1.2	Dana Perimbangan	934,046,394,149.00	1,230,606,234,043.00	31.74	1,332,071,479,000.00	8.26	20.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	20,786,783,149.00	27,939,248,043.00	34.54	33,691,177,000.00	20.59	27.56
1.2.2	DAU	845,395,651,000.00	884,557,753,000.00	4.63	884,557,753,000.00	-	2.32
1.2.3	DAK Fisik	67,683,960,000.00	95,304,533,000.00	40.39	106,209,000,000.00	11.44	25.92
1.2.3	DAK Non Fisik		222,704,700,000.00	-	307,813,549,000.00	38.13	19.06
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	166,720,667,489.00	40,362,247,474.00	(75.66)	8,000,000,000.00	(80.17)	(77.91)
1.3.1	Hbah	652,487,633.00	548,007,474.00	(8.01)	500,000,000.00	(8.76)	(12.39)
1.3.2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	165,088,179,856.00	39,804,240,000.00	(75.89)	7,500,000,000.00	(81.6)	(78.52)
1.3.3	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda Lainnya			-		-	-
1.3.4	Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah			-		-	-
1.3.5	Dana tambahan penghealian bagi GURU PNSD			-		-	-
1.3.6	Pendapatan dana darurat			-		-	-

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo



Tabel 3.11
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016
(Data 17 Jan 2016, Sebelum Hasil Pemeriksaan BPK RI)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	+/-	%
PENDAPATAN	1,676,010,907,814.69	1,595,099,203,009.91	(80,911,704,804.78)	95.17
PENDAPATAN ASLI DAERAH	357,884,605,814.69	324,240,721,492.91	(33,643,884,321.78)	90.60
Pendapatan Pajak Daerah	319,889,262,401.65	280,547,015,501.23	(39,342,246,900.42)	87.70
Hasil Retribusi Daerah	6,000,000,000.00	6,022,350,233.00	22,350,233.00	100.37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,000,000,000.00	2,101,314,049.00	(1,898,685,951.00)	52.53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27,995,343,413.04	35,570,041,709.68	7,574,698,296.64	127.06
DANA PERIMBANGAN	1,277,822,062,000.00	1,230,506,234,043.00	(47,315,827,957.00)	96.30
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29,611,475,000.00	27,939,248,043.00	(1,672,226,957.00)	94.35
Dana Alokasi Umum	884,557,753,000.00	884,557,753,000.00	0.00	100.00
Dana Alokasi Khusus Fisik	137,653,434,000.00	95,304,533,000.00	(42,348,901,000.00)	69.24
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	225,999,400,000.00	222,704,700,000.00	(3,294,700,000.00)	98.54
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40,304,240,000.00	40,352,247,474.00	48,007,474.00	100.12
Pendapatan Hibah	500,000,000.00	548,007,474.00	48,007,474.00	109.60
Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	39,804,240,000.00	39,804,240,000.00	0.00	100.00

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, meskipun pada tahun 2017 pendapatan daerah telah melampaui target RPJMD, dengan kenaikan rata-rata sebesar 10,58%, namun peningkatan tersebut lebih banyak dipengaruhi/disumbangkan oleh dana transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan dan dana insentif daerah.

Hal sebaliknya terjadi pada pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2017 ditargetkan naik sebesar 9,92% dibanding realisasi tahun 2016 (sebelum audit BPK-RI) atau lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan realisasi antara tahun 2015 ke tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 11,98%.

Melambatnya pertumbuhan PAD tersebut disebabkan oleh beberapa Faktor seperti, tidak stabilnya perekonomian nasional yang merambat sampai ke perekonomian daerah, harga BBM yang berfluktuasi, pengalihan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya kendaraan truck/ pick up, dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum (plat hitam ke plat kuning) dan beberapa penyebab lain yang tidak dapat diperkirakan pada waktu penetapan target pendapatan.

- b. Kapasitas Riil (Proyeksi) Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018.

Penghitungan kerangka pendanaan tetap berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.



Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan, khususnya kapasitas riil untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah pada RKPD 2018. Kapasitas riil Kemampuan Keuangan Daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2018

No	Uralan	2017	Proyeksi
1	Pendapatan	1,831,692,829,014.00	1,840,651,736,418.60
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10,415,469,650.00	1,131,868,226.43
	Total Penerimaan	1,842,108,298,664.00	1,841,783,604,645.03
	Dikurangi		
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1,094,339,234,901.87	1,137,964,785,923.91
7	Kapasitas Riil	747,769,063,762.13	703,818,818,721.12

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Sementara rincian belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama pada RKPD 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut.



Tabel 3.13
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Proyeksi
		(Rp) 2017	2018 (Rp)
A	Belanja TidakLangsung	1,034,870,651,628.87	1,075,444,495,908.06
1	Belanja Pegawai	571,774,213,560.07	601,498,859,491.69
2	Belanja Subsidi	-	-
3	Belanja Hibah (data diolah)	296,034,032,500.00	299,882,474,922.50
4	Belanja Bansos	2,103,000,000.00	2,709,923,914.34
5	Belanja bagi hasil Kab/Kota	148,635,022,694.80	156,066,773,829.54
6	Bantuan Keuangan (data diolah)	11,324,382,874.00	10,286,463,749.99
7	Belanja Tidak Terduga (antisipasi bencana)	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
B	Belanja Langsung	56,892,183,273.00	61,020,290,015.85
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. (hanya Guru)	-	-
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3,307,500,000.00	3,760,569,524.20
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	53,584,683,273.00	57,259,720,491.65
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-
C	Pengeluaran Pembiayaan	2,576,400,000.00	1,500,000,000.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-
3	Penyertaan Modal Pada PT bank Sulut	2,576,400,000.00	1,500,000,000.00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1,094,339,234,901.87	1,137,964,785,923.91

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Selanjutnya rencana penggunaan kapasitas riil Kemampuan keuangan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut.



Tabel 3.14
Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah
Provinsi Gorontalo 2018

No	Uralan	Proyeksi
		2018 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	703,818,818,721.12
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	
II.a	Belanja Langsung	893,265,048,252.84
II.b	Pembentukan dana cadangan	
	Dikurangi:	
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	61,020,290,015.85
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	1,500,000,000.00
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	830,744,758,236.99
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	(126,925,939,515.87)
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	
III.a	Belanja Tidak Langsung	948,518,556,392.19
	Dikurangi:	
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1,075,444,495,908.06
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	(126,925,939,515.87)
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	0.00

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut diatas, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2018 Provinsi Gorontalo relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan Provinsi lain, baik secara regional maupun nasional, Namun dalam kerangka pendanaan tersebut yang paling utama adalah sejauh mana kapasitas riil tersebut mampu menggerakkan sektor-sektor penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan menggali seluruh sumber daya yang ada di Provinsi Gorontalo sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Agar pemanfaatan dana efisien dan efektif, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan dua hal yaitu: (1) tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator

kinerja perlu ditetapkan secara jelas, (2) Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara efektif.

3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit" atau "memanfaatkan surplus" anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali.

Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan pada kebijakan:

- 1) Untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan manfaat yang optimal dan atau
- 2) Untuk mencari sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit.

Selanjutnya dalam keadaan surplus kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditempuh dapat berupa :

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok utang; dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang ditempuh dapat berupa:

- 1) Penggunaan silpa;
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman daerah; dan
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut maka proyeksi RKPD Tahun 2018 untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar **Rp1,131,868,226.43** dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan Tahun 2016 adalah berimbang atau 0 (nol) akan diuraikan pada Tabel 3.15 berikut.



Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	RKPD 2018
1	PENDAPATAN	1,840,651,736,418.60
2	BELANJA	1,840,283,604,645.03
	SURPLUS/DEFISIT	368,131,773.57
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	Penerimaan pembiayaan	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	1,131,868,226.43
1.2	Pencarian dana cadangan	
1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
1.6	Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek Berupa Deposito	
1.7	Penerimaan piutang daerah	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	1,131,868,226.43
2	Pengeluaran pembiayaan	
2.1	Pembentukan dana cadangan	
2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	1,500,000,000.00
	Investasi jangka pendek berupa deposito	
2.3	Pembayaran pokok utang	
2.4	Pemberian pinjaman daerah	
2.5	Penguatan Modal Pemerintah Daerah	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	1,500,000,000.00
	Pembiayaan neto	-368,131,773.57
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0.00

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan Tabel 3.15 tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berusaha untuk mengurangi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan dari tahun ke tahun. upaya yang dilakukan antara lain dengan membuat proyeksi pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan dengan melihat potensi yang ada. Pada sisi belanja dilakukan efisiensi dan efektifitas, tanpa mengabaikan penyerapan belanja daerah.



BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD periode tahun 2018 – 2022 belum disusun, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada tanggal 15 Februari tahun 2017, sehingga RKPD tahun 2018 yang akan menjadi bagian dari periode ketiga RPJMD (2018 – 2022) akan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025. Periode ketiga dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu **Gorontalo Maju Dan Mandiri**. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (*quality-sustainable growth*).

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. Untuk itu, sebagai kelanjutan dari periode pembangunan 2012 - 2017 dan sebagai masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan berikutnya, maka tema pembangunan dalam RKPD 2018 dalam rangka mempersiapkan prioritas pembangunan sebagai pijakan awal untuk memudahkan kepala daerah terpilih dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah, yaitu:

“Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Yang Ditunjang Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Unsur - unsur tema RKPD 2018 adalah :	
Peningkatan Layanan Dasar Yang Berkualitas Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sector yang masih persoalan utama daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Infrastruktur. • Pengembangan sector yang menjadi potensi daerah, yaitu Pertanian, Perikanan dan kelautan, Kehutanan • Pengembangan sector jasa untuk peningkatan ekonomi, Koperasi, UMKM, Industri, Pariwisata yang ditunjang tenaga kerja yang berkompeten • Konservasi hutan dan lahan, pengembangan sumberdaya



	alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);• Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;• Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;• Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasional (jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api ekonomi);• Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta Desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian dan perikanan;• Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan energy ketenagalistrikan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan public, keamanan dan ketertiban daerah• Mengupayakan peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan• Peningkatan kelestarian budaya dan mendorong penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat

Amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025 terhadap RKPD tahun 2018 adalah: 1) mewujudkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan; 2) mewujudkan sumberdaya manusia yang handal; dan 3) mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah dalam rangka mewujudkan Visi jangka panjang menjadikan Gorontalo Maju dan Mandiri.

Dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang menjadi daerah yang maju dan mandiri, maka perlu dibangun struktur perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan dan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing, serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat. Jika ini dapat dilakukan, maka perekonomian Gorontalo akan dapat tumbuh lebih cepat. Sehingga diharapkan perekonomian Gorontalo akan tumbuh rata-rata 7 - 8 persen per tahun secara berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perekonomian seperti tersebut diatas, dibutuhkan langkah strategis sebagai berikut: Pertama, dibutuhkan suatu reformasi yang bersifat menyeluruh (*comprehensive reform*) yang meliputi seluruh sektor, baik sektor-sektor utama perekonomian maupun sektor-sektor lainnya; kedua, dibutuhkan terobosan dan inovasi di tingkat kebijakan, strategi, dan program-program pembangunan serta peningkatan kinerja pada tingkat pelaksanaan pembangunan. Untuk itu kinerja aparatur diharapkan dapat ditingkatkan dengan semangat dan pola pikir (*mind set*) untuk menerapkan langkah-langkah *not business as usual*; ketiga, menerapkan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dalam proses pembangunan dan menjamin kualitas hasil pembangunan yang semakin meningkat yang dapat dinikmati tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga oleh generasi yang akan datang; keempat, pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, baik antarsektor pembangunan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat/swasta. Disamping itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perhitungan adalah kondisi perekonomian global, regional maupun nasional, kondisi geopolitik, geoekonomi dan bonus demografi.

Beberapa sektor pembangunan akan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang dikelompokkan kedalam lima kelompok besar yaitu bidang Pemerintahan politik Hukum dan keamanan, bidang pembangunan ekonomi, bidang pembangunan Kesejahteraan Rakyat, bidang pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah Berbasis Desa. Hal – hal penting pada kelompok bidang Pemerintahan, politik, dan keamanan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan antara lain adalah (a) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; dan (b) yang sangat penting sebagai landasan pembangunan di semua bidang adalah stabilitas politik dan keamanan daerah.

Dalam bidang ekonomi, hal – hal penting yang perlu mendapatkan prioritas penanganan antara lain adalah (a) proses transformasi struktur ekonomi daerah dari kondisi pembangunan ekonomi yang kurang efisien menjadi lebih efisien dengan peningkatan produktivitas di semua bidang; dari pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat di perkotaan bisa tersebar merata di perdesaan; dari struktur ekonomi yang mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam menjadi ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tinggi; dari ekonomi berbasis komoditi sektor primer bisa digeser kearah ekonomi jasa dan

ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi maritim dan lain-lain; (b) isu nasional terkait dengan ketahanan pangan, energy (ketenagalistrikan) dan ketahanan air juga harus menjadi perhatian dan prioritas pembangunan, ketiga sektor strategis ini yaitu pangan, energy dan air di masa yang akan datang akan semakin penting mengingat kebutuhan yang terus meningkat, sementara ketersediaannya relatif tetap, bahkan menurun; (c) Isu penyediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis pendukung sektor pembangunan ekonomi yang perlu menjadi prioritas daerah mengingat rendahnya daya saing Gorontalo maupun nasional salah satunya ditentukan oleh masalah penyediaan infrastruktur yang kurang memadai; (d) dukungan iptek dan pengembangan inovasi memegang peranan penting bagi peningkatan daya saing daerah. Untuk itu, dalam mewujudkan visi menjadi daerah maju dan mandiri, maka pengembangan iptek dan inovasi teknologi harus menjadi prioritas dan mendapat perhatian yang serius dengan dukungan pendanaan yang memadai.

Untuk kelompok bidang kesejahteraan rakyat, difokuskan pada (a) peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing dan menghadapi era pasar bebas yang dimulai dengan adanya Asean Economic Community (AEC) yang berlaku mulai akhir tahun 2015; (b) penyediaan lapangan kerja baru dalam upaya mendayagunakan tenaga kerja produktif yang tersedia karena adanya bonus demografi; (c) penanggulangan kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi persentasenya (d) isu pemerataan pendapatan yang selama beberapa tahun terakhir memburuk karena kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi dan menengah lebih cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan penduduk miskin; (e) perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin yang sudah dimulai pada RPJMD 2017-2022 salah satunya dengan program JAMKESTA yang harus terus diperluas dan disempurnakan kualitas pelayanannya.

Dalam kelompok bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup difokuskan pada (a) pengelolaan sumber daya alam yang baik dan ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri lokal maupun dalam negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan nilai tambahnya dapat lebih besar dinikmati oleh masyarakat.; (b) mengembangkan potensi pertanian yang selama ini telah menjadi prime mover perekonomian di Gorontalo; (c) mengembangkan potensi wilayah laut Gorontalo yang luasnya mencapai 50.500 Km² lebih luas dari wilayah daratannya; Peningkatan kualitas lingkungan hidup, konservasi hutan dan pengelolaan bencana.

Kelompok bidang kelima yang akan menjadi prioritas adalah terkait dengan pengembangan kewilayahan berbasis desa yang mencakup antara lain: (a) pemerataan pembangunan antar Kabupaten/Kota; pembangunan wilayah yang dititikberatkan pada potensi yang ada (b) pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) untuk pelayanan publik secara merata antardaerah sehingga tujuan agar masyarakat mendapatkan

pelayanan publik yang relatif sama dapat tercapai; (c) pembangunan perdesaan, meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik seperti akses pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

4.1 Arahan RPJPD 2007 – 2025 Terhadap RKPD 2018

Rumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RKPD 2018 tidak boleh terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2009, bahwa semua agenda pembangunan diarahkan untuk mewujudkan 3 (tiga) misi pembangunan daerah. Ketiga misi tersebut diupayakan pencapaiannya melalui berbagai arah kebijakan dan strategi pembangunan.

RKPD 2018 akan ditekankan pada membangun daya saing kompetitif perekonomian, hal ini juga merupakan kebijakan kunci untuk tercapainya misi RPJPD 2007-2025, khususnya Misi Pertama, yaitu ***Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal***, yaitu dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Pilar pembangunan ekonomi Gorontalo diletakkan pada kompetensi inti daerah, yakni pertanian (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), industri pengolahan, pariwisata, serta pertambangan dan energi, secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan ekonomi Gorontalo juga diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi dan usaha kecil menengah), optimalisasi perlindungan sumberdaya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional. Penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin bahwa prinsip-prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam tetap terjaga. Daya saing kompetitif tersebut akan diupayakan pencapaiannya melalui dua kebijakan umum, yaitu (a) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang didukung antara lain dengan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja dan UMKM, akselerasi pertumbuhan industri pengolahan, peningkatan efisiensi logistik dan distribusi yang merata diseluruh wilayah, dan peningkatan investasi; serta (b) pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah, dengan prioritas pada penguatan konektivitas regional maupun nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, pengembangan daerah tertinggal dan perdesaan, pengembangan wilayah strategis, pembangunan perkotaan dan perdesaan, pembangunan RTRW, dan pengembangan tata kelola pemerintahan. Sebagai basis pembangunan daya saing perekonomian yang kompetitif, Kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya manusia berkualitas, keunggulan sumber daya

alam, dan meningkatkan kemampuan iptek. Hal ini juga mengacu pada arah terwujudnya **Misi Kedua** RPJPD, yaitu **Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal**, adalah dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. Juga dengan **Misi ketiga RPJPD, yaitu Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah**, adalah dengan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, *right-sizing* OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, serta peningkatan penyeberluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada publik.

Dalam mengupayakan pencapaian misi-misi tersebut, kebijakan umum yang akan dilaksanakan dalam RKPD 2018 adalah: (a) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung antara lain dengan kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja dan UMKM, pariwisata, akselerasi pertumbuhan industri pengolahan, dan peningkatan investasi; (b) Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, yang diprioritaskan pada ketahanan pangan, energy dan ketahanan air; (c) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, dengan prioritas pada pemenuhan infrastruktur dasar, penyediaan transportasi, dan peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dan informasi; (d) pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, Peningkatan kualitas pelayanan public, Penerapan *e-government* untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, Peningkatan Kapasitas manajemen kinerja pembangunan, Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah, dan Membangun Kemitraan dan kerjasama (e) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dengan prioritas kebijakan kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan percepatan pengurangan kemiskinan; (f) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan konservasi hutan serta mitigasi bencana alam; serta (e) pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah, dengan



prioritas pada penguatan konektivitas daerah untuk mencapai keseimbangan pembangunan, pengembangan desa tertinggal dan pengembangan wilayah strategis.



Tabel 4.1
Matriks Arahan Rpjpd 2007 - 2025 Terhadap RKPD 2018

Misi RPJPD 2007-2025	Arahan RPJPD	Kebijakan Umum RKPD 2018	Prioritas RKPD 2018
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal	Pembangunan pertanian bernuansa agribisnis yang utuh dan menyeluruh	Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, konservasi hutan dan pengelolaan bencana	1. Pembangunan Pertanian & Perikanan Kelautan untuk Ketahanan pangan 2. Pembangunan Kelautan 3. Ketahanan Air dan Energi Kelistrikan 4. Konservasi hutan & perbaikan Kualitas LH, serta mitigasi bencana
	Pembangunan usaha pertambangan		
	Pembangunan & pengembangan industri	peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1. Peningkatan daya saing tenaga kerja 2. Peningkatan Koperasi dan UMKM 3. Pengembangan Industri berbasis potensi daerah 4. Pembangunan Pariwisata & Peningkatan Investasi
	Pembangunan pariwisata		
	Pembangunan perdagangan & jasa		
	Pengembangan investasi yang mendorong sektor riil		
Pengembangan koperasi dan UKM	Mempercepat pembangunan infrastruktur melalui pertumbuhan & Pemerataan Pembangunan Daerah	Pembangunan Teknologi dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dasar & meningkatkan konektivitas daerah dan Penataan Ruang	
Pembangunan infrastruktur (fisik & non-fisik)			Pengembangan wilayah strategis dan perdesaan
Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal	Peningkatan akses & kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	1. Kesehatan & Gizi Masyarakat 2. Pendidikan 3. Kebudayaan & Agama 4. Penanggulangan Kemiskinan
	Pembangunan kesehatan utk peningkatan akses & kualitas layanan		
	Pembangunan kependudukan utk peningkatan kualitas kesehatan ibu & anak		
	Pembangunan keagamaan utk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan & pengamalan nilai & ajaran agama		
	Pembangunan sosial budaya diarahkan pada peningkatan kualitas pemahaman dan pengejawantahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan		
	Jaminan Perlindungan sosial		
	Budaya dan adat isitadat		
Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah	Peningkatan pelayanan Publik	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai landasan pembangunan disegala bidang	1. Terus melakukan Reformasi Birokrasi 2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3. Pemantapan stabilitas keamanan & politik daerah 4. Pemantapan Hukum & Peraturan Daerah 5. Membangun kemitraan dan kerjasama
	Pengembangan Kualitas Aparatur		
	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah		
	Pembangunan keuangan daerah		
	Pengembangan Infrastruktur pemerintahan		
	Pembangunan Kemitraan daerah		
	Pembangunan Hukum & Perundang-undangan		
	Koordinasi Pemerintahan		
	Kemanaan dan Ketertiban		
	Sosial dan Politik		

4.2 Sasaran Pokok Pembangunan

Berdasarkan tema pembangunan, yaitu pembangunan yang kuat dan berkelanjutan serta berbagai pertimbangan tantangan dan permasalahan yang ada (diuraikan pada BAB II), maka sasaran Pokok pembangunan Gorontalo yaitu :

1. Ekonomi

Perekonomian Gorontalo harus dijaga tetap tumbuh relatif tinggi secara berkelanjutan. Pertumbuhan tersebut diperoleh berlandaskan penguatan struktur ekonomi, melalui ***penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan di berbagai wilayah*** sesuai keunggulan wilayah juga ***modernisasi sektor jasa*** yang didukung oleh ketersediaan layanan ***infrastruktur yang memadai***. Pertumbuhan tersebut harus bersifat inklusif, antara lain dengan ***penguatan peranan UKM*** yang lebih besar, peningkatan jumlah ***kesempatan kerja***, khususnya ***tenaga kerja produktif (decent jobs)***, dan berkembangnya akses keuangan ke masyarakat (*financial inclusion*). Selanjutnya ketahanan ekonomi juga dibangun di samping terus menjaga stabilitas makro juga dengan terus membangun ***ketahanan pangan dan ketahanan air*** dan kelautan.

2. Tata Kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, maka perlu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ***bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien***, yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Kesejahteraan Rakyat

Sasaran pokok pembangunan kesejahteraan rakyat tercapainya penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar penduduk di berbagai wilayah sebagai hasil pembangunan yang inklusif. Meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat tidak hanya dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat atau ***penurunan kemiskinan***, tetapi tetapi juga harus terlihat dari menurunnya ***laju pertumbuhan penduduk***, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yaitu taraf ***pendidikan, derajat kesehatan dan gizi masyarakat***, serta terciptanya system ***perlindungan sosial masyarakat*** yang baik.

4. Kewilayahan dan Desa

Pembangunan Kewilayahan dan Desa ditujukan untuk penurunan tingkat kesenjangan antar-wilayah yang ditunjukkan dengan ***menurunnya jumlah Desa tertinggal***, serta lebih meningkat dan merata pelayanan dasar di berbagai wilayah di Gorontalo.

5. Lingkungan, konservasi hutan dan mitigasi bencana

Sasaran pembangunan ini adalah untuk pengendalian, bahwa pembangunan diberbagai bidang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

4.3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Sebagaimana sasaran pokok pembangunan daerah, maka rumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo diuraikan dalam 5 Agenda utama pembangunan daerah, yaitu:

4.3.1 Agenda Pembangunan Ekonomi

Agenda utama pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan sektor-sektor ekonomi; pengamanan ketahanan pangan, energi, dan air; pembangunan infrastruktur; dan penguatan faktor utama pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk membuat struktur ekonomi yang kuat agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengupayakan pembangunan yang inklusif agar kesejahteraan lebih merata dan lebih berkeadilan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta terjadi secara berkelanjutan.

1. Pengembangan Sektor Primer

Pengembangan sektor primer dimaksudkan untuk meningkatkan produksi komoditi primer dan menyiapkan komoditi primer sebagai bahan baku industri pengolahan yang mencakup peningkatan hasil pertanian dan perikanan.

Peningkatan Hasil Pertanian dan Perikanan

Sasaran : Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang difokuskan pada : (1) peningkatan produktivitas, dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan potensial untuk ekspor; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan.

strategi dan kebijakan yang dilakukan meliputi :

- **Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat.** Peningkatan produktivitas merupakan upaya penting dalam revitalisasi perkebunan dan hortikultura. Peningkatan produktivitas tersebut terutama dilakukan melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor.
- **Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,** melalui: (1) penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir; (2) pengembangan/penerapan standard jaminan mutu komoditas pertanian dan standar jaminan mutu pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (3) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pertanian; (4) Peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi, dan (5) Peningkatan kualitas layanan pengawasan perkarantinaan.
- **Pengembangan agroindustri perdesaan,** diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui : Perbaikan dan penguatan teknologi agroindustri perdesaan yang sudah ada, Penguatan Kelembagaan

industri pengolahan pertanian yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi, Pengembangan industri perdesaan yang menangani produk segar hortikultura/diversifikasi produk, Pertumbuhan agroindustri perdesaan yang dapat memanfaatkan hasil secara optimal, dan Pengembangan kapasitas SDM (Produk agroindustri yang dibutuhkan masih banyak di impor antara lain : sayuran dan buah-buahan, produk agroindustri yang potensial dikembangkan terutama cabe, kopi, kakao, kelapa).

- **Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar** termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran melalui: (1) diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (2) penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian; (3) pengembangan jaringan pasar dan pelayanan informasi pasar.
- **Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran** melalui kemitraan Gapoktan dengan industri pengolahan dan eksportir **serta** membangun dan memperkuat jaringan dengan asosiasi, industri, dan **sektor jasa** terkait lainnya.

Tabel 4.2
Sasaran Produksi Komoditas Pertanian

Uraian	Baseline (2016)	Sasaran 2018
1. Produksi Perkebunan		
Kelapa	54.868 ton	55.186 ton
Tebu	49.331	50.101 ton
Cengkeh	937 ton	941 ton
Kakao	4.564,6 ton	4936 ton
Nilam (Minyak Atsiri)	43 ton	43,09 ton
Pala	3 ton	3,03 ton
2. Hortikultura		
Bawang Merah	1.108 ton	1.130 ton
Cabai	10.525 ton	10.683 ton
Jeruk	864 ton	882 ton

Sasaran : Peningkatan Industri Usaha Perikanan

Strategi dan Arah Kebijakan

- **Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan**, melalui: (1) pengembangan kapasitas, produktifitas dan daya saing UMKM pengolahan hasil perikanan (rumput laut, ikan asap, ikan asin, udang paname, kerapu); (2) revitalisasi dan pembangunan pabrik es, *cold storage* di lokasi-lokasi yang tepat.

- **Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan**, melalui: (1) pengembangan balai benih ikan/udang.
- **Penguatan Kelembagaan**, melalui: (1) penguatan forum koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan menuju kelembagaan pengelolaan WPP; (2) pengawasan penguatan pengelolaan wilayah perikanan sebagai sentra wilayah pertumbuhan produksi; (3) penataan perizinan yang terintegrasi; (4) penguatan kelompok usaha perikanan dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi akses permodalan yang mudah dan terjangkau;
- **Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM Perikanan**, melalui peningkatan kualitas kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

2. Pengembangan Sektor Jasa

Pengembangan sektor jasa difokuskan pada peningkatan daya saing UMKM dan koperasi; serta peningkatan pariwisata.

Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi :

Jumlah UMKM dan Koperasi semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun belum dapat bersaing secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala dalam meningkatkan kualitas UMKM dan Koperasi, terutama dengan skala usaha mikro, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, modal, dan pemanfaatan teknologi.

Sasaran : Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM yang ditunjukkan oleh meningkatnya produktivitas, jumlah UMKM yang terdaftar/formal, meningkatnya akses ke pembiayaan dan teknologi, meningkatnya kualitas produk, dan meningkatnya keterlibatan UMKM dalam kemitraan atau jaringan usaha.

Strategi : Peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) UMKM dan koperasi;
2. Perluasan akses UMKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi;
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran UMKM dan koperasi;
4. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi melalui perumusan regulasi.

Perdagangan

Beberapa hal yang masih menjadi focus perhatian dalam peningkatan perdagangan regional adalah kurang memadainya sarana dan prasarana perdagangan seperti pasar rakyat dan pusat distribusi serta masih lemahnya mekanisme dalam pengendalian harga kebutuhan pokok yang sering bergejolak.

Sasaran : Meningkatkan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung ekspor komoditi daerah dan penguatan pengendalian harga



Strategi : Mendorong pembangunan sarana distribusi barang, menjaga stabilitas harga dan meningkatkan layanan standardisasi produk

Kebijakan :

1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan serta menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok.
2. Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi produk dan perlindungan konsumen.

Tabel 4.3
Sasaran Koperasi UMKM dan Perdagangan

Uraian	Baseline (2016)	Sasaran 2018
Jumlah Koperasi Aktif	658 koperasi	660 koperasi
Jumlah IKM	14.339 IKM	14.150 IKM
Jumlah Sentra IKM	297 sentra	312 sentra
Jumlah UKM Non BPR / LKM UKM	n/a	n/a
Jumlah BPR/LKM	n/a	n/a
Jumlah KUMKM yang difasilitasi akses permodalan	15.381 KUKM	540 KUKM
Nilai Ekspor	144.291 ton	240.068 ton
Volume Perdagangan antar pulau	120.118 ton	200.000 ton
Indeks Keberdayaan Konsumen	n/a	n/a

Peningkatan Pariwisata

Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pariwisata pada umumnya menunjukkan kecenderungan pencapaian kinerja yang semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Gorontalo.

Sasaran : Meningkatkan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara

Tabel 4.4
Sasaran Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Uraian	Baseline (2016)	Sasaran 2018
Pertumbuhan PDB Pariwisata		
Jumlah Wisatawan	368.000	3000 Wisman & 127.000 Wisnus

Strategi : Mengembangkan Pariwisata Daerah

Arah Kebijakan :

1. **Promosi Pariwisata Daerah** diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal, fokus pada 6 kawasan strategis pengembangan dan pembangunan pariwisata yang ditetapkan dalam RIPPDA.

2. **Pembangunan Destinasi Pariwisata** diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri.
3. **Pembangunan Kelembagaan Pariwisata** diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan.

3. Ketahanan Pangan, dan Air

Ketahanan Pangan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik yang menyusun Buku Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, dimana didalamnya terdapat proyeksi penduduk untuk setiap provinsi. Provinsi Gorontalo ditahun 2020 di proyeksikan penduduknya bisa mencapai 1.219.600 dan pada tahun 2025 bisa mencapai 1.299.700. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat diiringi dengan isu pemenuhan nutrisi bagi penduduk akan menjadi tantangan kedepan. Dengan proyeksi penambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun tersebut, maka kebutuhan pangan yang harus disediakan juga cukup besar. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menuntaskan permasalahan kekurangan gizi.

Sasaran : Meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan dan perikanan dengan tetap menjaga kualitas konsumsi pangan.

Tabel 4.5
Sasaran Ketahanan Pangan

Komoditi	Satuan	Baseline 2016	Sasaran 2018
1. Produksi			
a. Padi	Ton	332.315	333.016
b. Jagung	Ton	911.341	1.033,46
c. Kedelai	Ton	3.660	4.160
d. Daging Sapi	ton	1.920,07	2.037,00
e. Daging Ayam	Ton	1.621,78	1.720,55
f. Perikanan (diluar rumput laut)	Ton	153.968	172.427
g. Perikanan Tangkap	Ton	115.873	127.296
h. Perikanan Budidaya	Ton	38.295	45.131
i. Budidaya Rumput Laut	Ton	61.950	50.478
2. Konsumsi			
a. Konsumsi Kalori KKL	Kkal	n/a	n/a
b. Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	55,7	57,38
3. Skor Pola Pangan Harapan		79,4	84,7
4. Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	2,500,000	2.700.000
Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir)	Desa	16	5



Kebijakan : Pemantapan ketahanan pangan menuju Kedaulatan pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Strategi yang dilakukan :

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi
 - a) **Pengendalian konversi dan perluasan areal baru** terutama memanfaatkan lahan terlantar, lahan marginal, lahan di kawasan transmigrasi, dan memanfaatkan tumpang sari di lahan perkebunan;
 - b) **Peningkatan produktivitas** dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan; (ii) **Revitalisasi penyuluhan** sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman pangan;
 - c) **Pengembangan pola produksi ramah lingkungan** dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik.
 - d) **Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen** dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil termasuk pembangunan penggilingan padi.
2. Pengembangan Desa Mandiri Benih, melalui bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung)

kebijakan : Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan luas tanam dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura terutama jagung, kedelai, cabai, bawang yang adaptif terhadap kondisi iklim

Produksi Pangan Lainnya

- a. **Peningkatan produksi daging sapi, kambing dan unggas** melalui: (i) penambahan populasi bibit induk sapi, (ii) pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penambahan bibit induk sapi, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis.

Produksi Perikanan

- a. **Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan** melalui: (i) peningkatan produktifitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap (*kampung Vaname, kampung Lele*); (ii) peningkatan produktifitas dan pengembangan kawasan sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi-lokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (iv) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan **strategis**; (vii) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang **efisien** dan ramah lingkungan.
 - b. **Sarana Prasarana Pendukung Produksi**, dengan: (i) menjamin ketersediaan dan **kemudahan** rantai distribusi input, yang mencakup BBM, benih ikan berkualitas, **pakan** murah, obat-obatan, dan pakan berbasis bahan baku lokal (ii) **penguatan sistem** dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan **Induk** unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting; (iii) **pengembangan kapasitas** manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan dan sarana **penangkapan** ikan
 - c. **Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan**, melalui: (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan; (iii) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (iv) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan/petambak garam/pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.
3. Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan, dilakukan dalam rangka mengantisipasi dampak bencana alam dan perubahan iklim serta serangan organisme tanaman dan penyakit hewan, melalui : Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani dan pembudidaya ikan yang terkena puso atau banjir, dan Pengembangan Instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan yang diawali dengan *pilot project*
4. Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan, dilakukan melalui :
- Peningkatan kualitas distribusi:** (i) peningkatan penyediaan dan sinergi fasilitas transportasi, penguatan sistem logistik untuk input produksi dan produk pangan, termasuk wilayah-wilayah terpencil dan rawan pangan; (ii) mendorong tersedianya lumbung pangan desa, waserda dan pengawasan gudang-gudang penyimpanan, pemantauan perkembangan harga pangan dan pengendalian

- fluktuasi harga antara lain melalui operasi pasar; (iii) pemetaan dan membangun ketersambungan rantal pasok komoditi hasil pertanian dengan industri pangan (iv) pendataan daerah rawan pangan.
5. Perbaiki Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat, dilakukan melalui :
- Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi:** (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keluarga melalui posyandu; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (dagang dan telur); (iv) penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
6. Peningkatan layanan jaringan irigasi, melalui Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural, serta membangun daerah irigasi baru.

Ketahanan Air

Ketahanan air adalah kondisi dari keterpenuhan air yang layak dan yang berkelanjutan untuk seluruh kehidupan, serta kemampuan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh air. Dengan demikian secara prinsip ketahanan air mencakup 2 (dua) hal yaitu: 1) keterpenuhan air secara layak baik kuantitas maupun kualitas dan berkelanjutan termasuk keberlanjutan bagi kehidupan dan ekosistemnya, dan 2) kemampuan mengurangi risiko daya rusak air. Mengingat air merupakan unsur penting dan strategis dalam mendukung kehidupan, maka dimensi ketahanan air harus mewadahi keseluruhan aspek kehidupan dan aspek kewilayahan. Oleh karena itu dimensi ketahanan air tersebut mencakup 5 (lima) dimensi, yaitu: 1) keterpenuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, 2) keterpenuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, 3) terpelihara dan terpulihkannya sumber air dan ekosistemnya, 4) ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, dan 5) kelembagaan dan tatalaksana yang mantap.

Sasaran : Meningkatnya ketahanan dan pengelolaan sumberdaya air

Strategi : Peningkatan ketersediaan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat

Tabel 4.6
Sasaran Ketahanan Air

Uraian	2016	2018
1. Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif		
a. Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Air Permukaan	17.131 Ha	17.131
2. Mengurangi daya rusak air		
a. Panjang Pengaman pantai yang dibangun	405 Meter	737,37 meter



b. Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun	426,6 meter	500 meter
---	-------------	-----------

Kebijakan yang dilakukan adalah :

- a. Mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan.
- b. Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta solusi non struktural manajemen banjir antara lain kesiapsiagaan banjir serta penataan kawasan.
- c. Pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air bersih.
- d. Pengelolaan DAS Terpadu dengan peningkatan penanganan kualitas DAS di Provinsi Gorontalo
- e. Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, danau, muara sungai, pantai, dengan indikator membaiknya kualitas air di danau limboto dan 5 wilayah sungai.

4. Pembangunan Infrastruktur

Penguatan Konektivitas Daerah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka penguatan konektivitas daerah

Strategi :

1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.
2. Peningkatan keselamatan dan kemanaan transportasi untuk menuju zero accident.
3. Peningkatan layanan e-Government dan komunikasi informatika didaerah.
4. Penguatan terhadap Pengembangan infrastruktur nasional didaerah.

Kebijakan :

1. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata)
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi

3. Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat.
4. Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi nasional (jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta api ekonomi)

Tabel 4.7
Sasaran Pembangunan Infrastruktur Untuk Konektivitas Daerah

No	Pembangunan	Baseline (2016)	Sasaran (2018)
a.	Panjang jalan Provinsi yang dibangun/ditingkatkan (Km)	18,52	10 Km
b.	Panjang jalan Strategis Provinsi yang ditangani(Km)	16,54	10 KM
c.	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	41,15 %	60 %
d.	Pembangunan terminal tipe B	5 Terminal	6 Terminal
e.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas		
f.	Indeks E-Government	3,75	

5. Pembangunan Prasarana Dasar

Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan ketenagalistrikan. Prioritas pembangunan infrastruktur/prasarana dasar tersebut diuraikan berikut ini.

Pembangunan Perumahan & Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi

Kebutuhan masyarakat akan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Khususnya bagi perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Untuk mencapai kualitas permukiman yang layak, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar bagi masyarakat mutlak diperlukan. Tantangan dalam penyediaan air minum dan sanitasi adalah memperluas akses dan menjamin keberlanjutan sarana prasarana yang terbangun.

Sasaran : Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, air minum dan sanitasi yang layak

Strategi : Peningkatan peran fasilitasi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dan Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.

Kebijakan : Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.